



Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Bergas Kidul Kabupaten Semarang

Ananda Verdianzah Saputra^{*}, Anisa Kusumawardani

Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 24-05-2024

Disetujui: 30-08-2024

Dipublikasikan: 31-08-2024

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis data yang dikumpulkan dari masyarakat setempat di Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, untuk mengetahui bagaimana variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa. Dalam penelitian ini penulis menambahkan beberapa variabel independent pengelolaan dana desa. Laporan tahunan lengkap yang mencakup semua variabel penelitian ini telah disiapkan dan diterbitkan oleh pemerintah setempat. Rumus Slovin digunakan sebagai metode pengambilan sampel dari populasi sebanyak 4.159 Masyarakat Desa, dan terdapat 98 responden dalam sampel. Metode analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

The influence of transparency, accountability, and community participation in village fund management on community empowerment in Bergas Kidul Village, Semarang Regency

Abstract

Keywords:

accountability; community participation; transparency; village fund management

The purpose of this study was to analyze data collected from local communities in Bergas Kidul Village, Semarang Regency, Central Java, to determine how the variables Transparency, Accountability, and Community Participation in Village Fund Management affect village community empowerment. In this study, the author added several independent variables of village fund management. A complete annual report covering all of the variables of this study has been prepared and published by the local government. The Slovin formula was used as a sampling method from a population of 4,159 Village Communities, and there were 98 respondents in the sample. The data analysis method used was Partial Least Square. The results showed that Transparency had a positive and significant effect on Community Empowerment, Accountability did not have a positive and significant effect on Community Empowerment, Community Participation did not have a positive and significant effect on Community Empowerment and Village Fund Management had a positive and significant effect on Community Empowerment.

^{*}Alamat korespondensi: anandaverdianzah@gmail.com

PENDAHULUAN

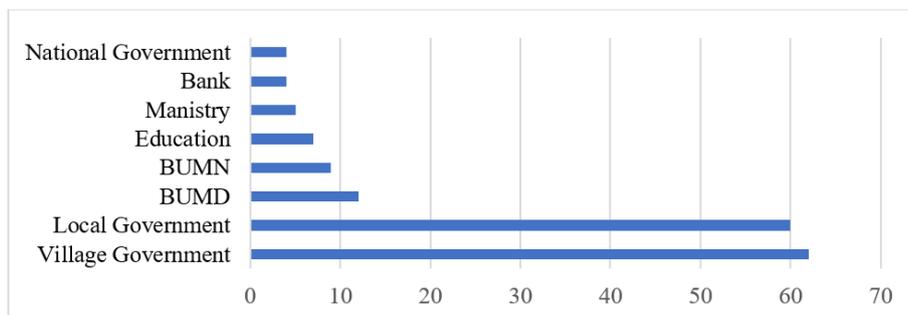
Desa merupakan bagian pemerintahan yang mempunyai peranan penting, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik. Selain itu juga mempunyai kebutuhan dan kepentingan strategis yang berkaitan dengan masyarakat. Pemerintah desa seharusnya mengakui bagian-bagian administrasi yang baik di bidang administrasi publik sehingga dapat mempengaruhi bantuan pemerintah jaringan kota terdekat. Desa harus memiliki aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam bidang pelayanan publik yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam pelaksanaannya. Salah satu fungsi utama pemerintahan adalah memberikan pelayanan publik. Pelayanan administrasi saat ini termasuk dalam kategori pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik umum dan khusus kepada masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pemerintahan kota diubah menjadi lembaga sosial publik untuk menyelenggarakan administrasi publik yang jelas, produktif dan bertanggung jawab dalam periode desentralisasi yang sedang berlangsung (Titania, 2023).

Desa merupakan bagian paling kecil dari pemerintahan, memiliki otoritas untuk merencanakan pertumbuhan untuk meningkatkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Lestari et al., 2023). Anggaran dana desa terus meningkat setiap tahun, menurut Kementerian Keuangan. Desa tentu saja mendapat manfaat dari peningkatan alokasi dana mereka setiap tahunnya. Prasarana dan fasilitas umum yang dibangun dengan dana desa telah meningkatkan kualitas hidup warga. Beberapa hasil yang dihasilkan oleh dana desa mencakup pembangunan jalan-jalan kota, jembatan, pameran, tempat sekolah anak-anak, dan lain-lain. Namun, hal ini juga menimbulkan permasalahan besar, misalnya memastikan pemerintah kota mengawasi dana dengan tepat dan akurat setelah mengawasi aset yang sangat besar (Kede, 2019).

Kajian ICW lainnya pada tahun 2023 menyimpulkan bahwa terdapat 44 kasus korupsi yang berasal dari sektor anggaran desa, sebagaimana terungkap dalam pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada semester I tahun 2020. Kasus yang ditemukan oleh *Indonesia Corruption Watch tahun 2023* merilis temuan riset berupa tindakan korupsi dan *fraud* terbanyak sebesar lebih dari 63% terletak di pemerintah desa sedangkan nomor dua terbanyak sebesar 60% ditempati oleh pemerintah daerah. Dikatakan bahwa untuk memperbaiki dan meningkatkan pemberantasan korupsi dan mekanisme audit di tingkat desa, apalagi dengan masifnya digitalisasi, kompetensi akuntansi merupakan progress yang krusial untuk segera diterapkan di ekonomi desa (ICW, 2023).

Diperkuat dengan Iklan Proklamasi Biro Sekretariat Republik Indonesia pada bulan Agustus 2023 yang menyatakan bahwa hal-hal bermanfaat terjadi ketika satuan pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah yang tidak kenal takut dan imajinatif sehingga besarnya kekuasaan yang dimiliki dapat memberikan manfaat yang baik bagi daerahnya (Humas, 2023). Namun, semakin banyak daerah yang belum mampu mengelola urusan pemerintahan yang sangat kompleks secara mandiri. Beragamnya impian dan misi kepala daerah, selain keputusan dan kepentingan politik yang tidak terkontrol, juga menimbulkan pemberontakan sehingga pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, dan

penguatan kawasan di kota juga tidak efektif. Masih terbatasnya SDM (SDM) yang ahli di bidangnya, dan koordinasi antar lembaga administrasi dalam dan luar (APIP, BPK, dan Inspektorat Pelayanan) juga masih memerlukan kemahiran (Setiawan & Jesaja, 2022).



Gambar 1. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Institusi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendukung kegiatan pengembangan desa wisata seperti pernyataan Hawin (2023), 13 desa wisata di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menerima bantuan finansial dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Total bantuan mencapai Rp1,3 miliar. Menurut Wiwin Sulistyowati, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan potensi wisata di masing-masing desa. Menurut Wiwin, Rabu (8/11/2023), bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata desa-desa tersebut, meningkatkan kunjungan wisatawan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah tiga belas desa wisata di Kabupaten Semarang yang menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah: Desa Wisata Candirejo, yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Desa Wisata Banyubiru, yang terletak di Kecamatan Banyubiru, Desa Wisata Candisari, yang terletak di Kecamatan Pabelan, Desa Wisata Karanganyar, yang terletak di Kecamatan Pabelan, Wisata Sidomukti, yang terletak di Kecamatan Ungaran Barat, Wisata Desa Candimulyo di Kecamatan Ungaran Barat, Desa Wisata Candimulyo, Kecamatan Ungaran Timur, Desa Wisata Bergas Lor, Kecamatan Bergas, Desa Wisata Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Desa Wisata Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Desa Wisata Bergas Lor, Kecamatan Bawen, dan Desa Wisata Sumowono, Kecamatan Sumowono dipilih karena memiliki potensi wisata alam, budaya, dan edukasi yang sangat besar

Desa Wisata Bergas Kidul akan menggunakan dana yang diberikan kepada Kecamatan Bergas Kidul untuk meningkatkan potensi wisata desa. Anggaran tersebut akan digunakan Pembangunan prasarana dan sarana wisata, seperti: (1) Ruang Informasi dan Promosi Wisata akan dibangun untuk memberikan informasi tentang potensi wisata Desa Wisata Bergas kidul kepada wisatawan. (2) Ruang ini juga akan digunakan untuk mempromosikan Desa Wisata Bergas Kidul kepada wisatawan. (3) Jalan Akses Wisata akan dibangun untuk mempermudah akses wisatawan ke Desa Wisata Bergas Kidul. (4) Jalan Akses Wisata akan dibangun dengan lebar 4meter dan dilengkapi trotoar. (5) Fasilitas Umum, seperti toilet, akan dibangun. Fasilitas-fasilitas ini akan dibangun sesuai standar yang sesuai. Pengembangan produk wisata akan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik

pengunjung di desa Wisata Bergas Kidul. Produk pariwisata yang akan dikembangkan antara lain kuliner, kerajinan dan seni. Dengan berkembangnya sarana dan prasarana pariwisata diharapkan Desa Wisata Bergas Kidul dapat menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan berkualitas bagi wisatawan.

Penelitian oleh Ihza Pahlevi et al. (2022) meunjukkan hasil terdapat adanya pengaruh antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2021) yang membuktikan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara positif terhadap pengelolaan alokasi dan desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Paselle et al., 2019) juga membuktikan bahwa transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa memiliki peran yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Kualitas pemberdayaan masyarakat akan semakin meningkat jika penerapan sikap yang akuntabel, transparan, serta partisipasi dari masyarakat juga meningkat.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen (Rahmadhani et al., 2024). Pemerintah desa yang bertindak sebagai agen bertanggung jawab mengelola alokasi dana desa mulai dari desain hingga hasil akhir. Pemerintah desa diharapkan dapat melakukan pengawasan terhadap dana kota secara efektif dan sesuai sasaran sehingga bantuan pemerintah terhadap daerah sebagai yang terdepan dalam siklus kemajuan kota dapat terlaksana. Pemerintah desa wajib menerapkan akuntabilitas yang transparan. Selain itu tanggung jawabnya juga bersifat terbuka, lugas dan lugas dengan melibatkan masyarakat setempat. Kontrak antara masyarakat dan pemerintah desa tercipta dari hubungan antara penelitian saya dan teori keagenan. Diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan menggunakan teori keagenan.

Pengaruh transparansi terhadap pemberdayaan masyarakat

Transparansi adalah salah satu sudut pandang yang penting untuk diperhatikan dalam mengawasi dana desa. Hal ini sesuai hipotesis perkantoran mengenai ketimpangan data (Kartika et al., 2023), dimana daerah sebagai kepala desa tidak mendapatkan data yang sama dengan pemerintah desa sebagai ahlinya. Dengan transparansi tersebut, diyakini daerah setempat akan benar-benar ingin mendapatkan data yang nyata dan lengkap, agar terhindar dari adanya ketimpangan data di antara keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2021) dan Ihza Pahlevi et al., (2022) menyatakan bahwa transparansi menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Oleh karenanya, hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat

Tanggung jawab pengawasan dana desa merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara peraturan, dan selanjutnya sebagai pengelola aset desa terhadap daerah setempat yang memperoleh manfaat dari pemanfaatan dana desa.

Karena mengacu pada tujuan dana desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, maka pelaksanaan akuntabilitas kepada masyarakat harus dilakukan. Standar Esensial Tanggung Jawab yang terdiri dari transparansi, kewajiban, pengendalian, kewajiban, dan daya tanggap adalah lima tipologi gagasan tanggung jawab (Saputri et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto & Hariani (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Dan pada penelitian dari Saputri et al. (2023) menunjukkan bahwa hasil dari akuntabilitas berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat.

Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan bentuk andil masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Masyarakat tidak hanya ikut serta dalam kegiatan, namun juga ikut serta dalam kegiatan merencanakan, melaksanakan, memonitor sampai tahap penilaian akhir dari kegiatan yang dilakukan. dalam penelitiannya menyebutkan bahwa antara partisipasi masyarakat dan pembangunan desa terdapat pengaruh positif serta signifikan. Di era revolusi industri 5.0 dengan berkembang pesatnya Teknologi maka semua lapisan masyarakat diharapkan mampu menyesuaikan diri (Kusumawardani et al., 2024) tak terkecuali masyarakat di desa. Hal ini terkait dengan penelitian saat ini yang menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu metode pembangunan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Syafi'i (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut

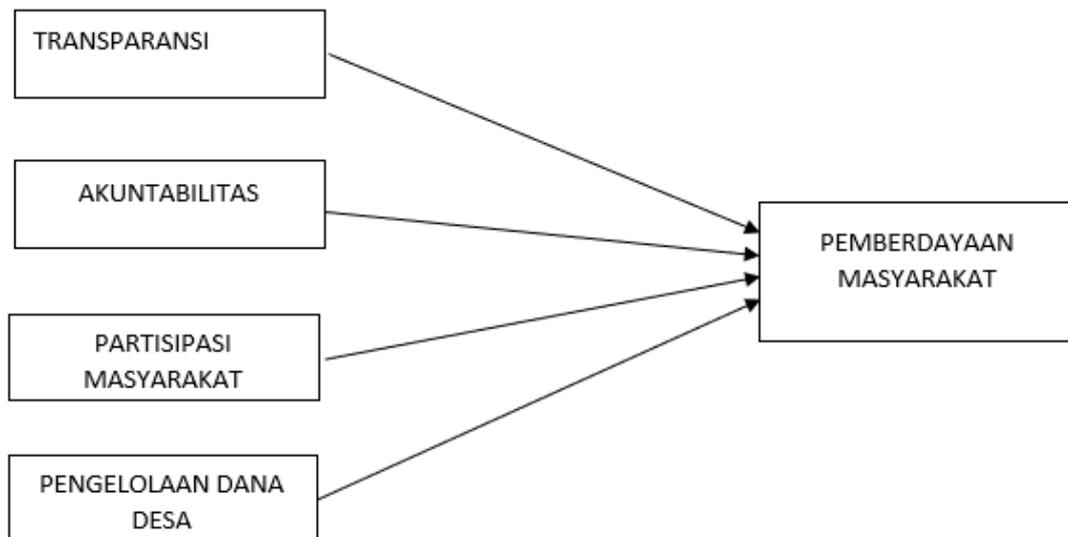
H3: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Pengaruh pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat

Pengelolaan Dana Desa dapat diawali perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan sehingga mampu mengendalikan kegiatan-kegiatan masyarakat yang di berdayakan dan masyarakat tersebut mampu mengembangkan potensinya sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan mengaktualisasikan diri dan mampu berpartisipasi melalui berbagai macam aktivitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugista (2017) mengenai pengaruh pengelolaan dana desa mendapatkan hasil bahwa pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. dan pada penelitian yang dilakukan oleh (Syafi'i, 2018) mengemukakan bahwasananya hasil dari variabel pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas maka secara teoritis pengelolaan dana desa dengan pemberdayaan masyarakat terdapat pengaruh. Oleh karena itu, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H4: Pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis ilustratif dengan menggunakan metodologi kuantitatif, karena eksplorasi ini diperkenalkan dengan menggunakan angka-angka dan memahami suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau hingga beberapa waktu yang lalu. Informasi eksplorasi seperti ini merupakan informasi penting, yaitu informasi penelitian yang diperoleh langsung dari sumber-sumber tertentu (tanpa perantara) dan sumber informasi penting dalam penelitian ini diperoleh dari balasan jajak pendapat yang disebarkan kepada responden. Responden dalam pemeriksaan ini adalah masyarakat Desa Bergas Kidul, Kota Semarang. Survei merupakan daftar pernyataan yang harus dijawab atau diisi oleh responden. Peneliti akan membagikan kuesioner kepada yang menjawab, dan yang menjawab akan menandai jawabannya dengan skala ordinal. Peneliti kemudian akan membagikan kuesioner kepada orang yang menjawabnya. Metode pemeriksaan informasi dalam eksplorasi ini menggunakan penyelidikan kuantitatif, artinya tes tersebut menggunakan perangkat faktual untuk menangani permasalahan dalam struktur kuantitatif. Alat logika yang digunakan adalah berbagai pemeriksaan relaps langsung dengan menggunakan *software* SMART PLS4. Koefisien determinasi dapat diuji untuk membuat inner model, dan hasilnya dapat dilihat pada besarnya R Square. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independen terhadap variabel dependen. Karena variabel dan indikator dianggap berada dalam skala zero mean dan unit *variance* dengan nilai yang *standardized*, konstanta dapat dihilangkan dari model (Ghozali, 2012). Sebagai berikut dapat ditulis model persamaan penelitian:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e.$$

Dimana:

- Y = Pemberdayaan Masyarakat
- α = Konstanta
- β_1 - β_4 = Koefisien regresi variabel
- X1 = Transparansi
- X2 = Akuntabilitas
- X3 = Partisipasi Masyarakat
- X4 = Pengelolaan Dana Desa
- e = Standar Error (5%)

Besar nilai konstanta dalam model regresi ini tercermin dalam α , sedangkan besarnya koefisien regresi masing-masing variabel ditunjukkan dengan β_1 , β_2 , β_3 , β_4 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif ini memiliki tujuan diharapkan dapat memberikan garis besar (gambaran) informasi yang disampaikan sehingga lugas dan instruktif. Nilai minimum dan maksimum, serta karakteristik data lainnya, dijelaskan oleh statistik deskriptif ini. Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Pengelolaan Dana Desa merupakan variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini, sedangkan Pemberdayaan Masyarakat sebagai variabel dependen. Secara grafis, banyaknya informasi yang dimanfaatkan adalah 98 responden di Desa Bergas Kidul. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	<i>Min</i>	<i>Max</i>
Transparansi	-1.834	1.595
Akuntabilitas	-1.772	1.794
Partisipasi Masyarakat	-1.902	1.812
Pengelolaan Dana Desa	-1.843	1.645
Pemberdayaan Masyarakat	-1.869	1.616

Sumber: Data Primer yang diolah, 2024

Pengukuran Model

Hubungan antara variabel dan indikatornya dievaluasi menggunakan *Outer model*, dan ada tiga jenis pengujian: *convergent validity*, *discriminant validity*, dan pengujian reliabilitas. Nilai outer model dapat digunakan untuk mengamati pengujian *convergent validity*. *convergent validity* harus lebih besar dari 0,7, menurut aturan umum, tetapi nilai antara 0,4 dan 0,6 dapat diterima.

Hasil *outer model* berdasarkan tabel 2 membuktikan bahwa nilai outer loading sebagian > 0.7 sehingga dapat dinyatakan bahwa semua indikator variable memiliki validitas *convergent* yang baik.

Tabel 2. *Outer Loading*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
Transparansi	X1.1	0.915	<i>Valid</i>
	X1.2	0.957	<i>Valid</i>
	X1.3	0.926	<i>Valid</i>
Akuntabilitas	X2.1	0.911	<i>Valid</i>
	X2.2	0.953	<i>Valid</i>
	X2.3	0.956	<i>Valid</i>
	X2.4	0.941	<i>Valid</i>
Partisipasi Masyarakat	X 3.1	0.927	<i>Valid</i>
	X 3.2	0.950	<i>Valid</i>
	X 3.3	0.928	<i>Valid</i>
	X 3.4	0.916	<i>Valid</i>
Pengelolaan Dana Desa	X 4.1	0.935	<i>Valid</i>
	X 4.2	0.955	<i>Valid</i>
	X 4.3	0.950	<i>Valid</i>
	X 4.4	0.923	<i>Valid</i>
Pemberdayaan Masyarakat	Y 1.1	0.938	<i>Valid</i>
	Y 2.2	0.937	<i>Valid</i>
	Y 3.3	0.961	<i>Valid</i>
	Y 4.4	0.902	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Semua indikator yang digunakan dalam penelitian telah memenuhi validitas discriminant, seperti yang ditunjukkan oleh nilai correlations untuk masing-masing indikator dengan variabelnya, seperti yang ditunjukkan dalam table 3.

Tabel 3. *Correlations*

Indikator	Transparansi	Akuntabilitas	Partisipasi Masyarakat	Pengelolaan Dana Desa	Pemberdayaan Masyarakat
Transparansi	1.000	0.906	0.870	0.841	0.864
Akuntabilitas	0.906	1.000	0.936	0.923	0.878
Partisipasi Masyarakat	0.870	0.936	1.000	0.937	0.860
Pengelolaan Dana Desa	0.841	0.923	0.937	1.000	0.886
Pemberdayaan Masyarakat	0.864	0.878	0.860	0.886	1.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan table 4 menunjukkan bahwa nilai masing-masing variabel > 0.7 , sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan memiliki reliabilitas yang cukup baik.

Tabel 4. *Composite Reliability, Cronbach's Alpha & Average Variance Extracted*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Realibility</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Transparansi	0.925	0.928	0.870
Akuntabilitas	0.956	0.957	0.885
Partisipasi Masyarakat	0.948	0.950	0.866
Pengelolaan dana Desa	0.957	0.960	0.885
Pemberdayaan Masyarakat	0.952	0.956	0.873

Sumber: Output SmartPLS

Tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel Transparansi, Akuntabilitas, Peran Serta Masyarakat, dan Pengelolaan Dana Desa (83,4%) ditunjukkan pada Tabel 5. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi variabel Pemberdayaan Masyarakat secara memadai.

Tabel 5. *R-Square & R-Square Adjusted*

Variabel	<i>R-square</i>	<i>R-square adjusted</i>
Pemberdayaan Masyarakat	0.834	0.827

Sumber: Output SmartPLS

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa model yang tersirat dalam matriks korelasi cukup sesuai, seperti yang ditunjukkan oleh nilai SRMR sebesar 0,043 kurang dari 0,08. *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) adalah pengukuran kesesuaian yang baik untuk PLS-SEM dan dapat digunakan untuk menghindari model *misspecification*.

Tabel 6. Hasil Pengujian *Goodness of Fit* (GOF)

Parameter	<i>Estimated Model</i>	<i>Standart</i>
SMRM	0.043	< 0.08

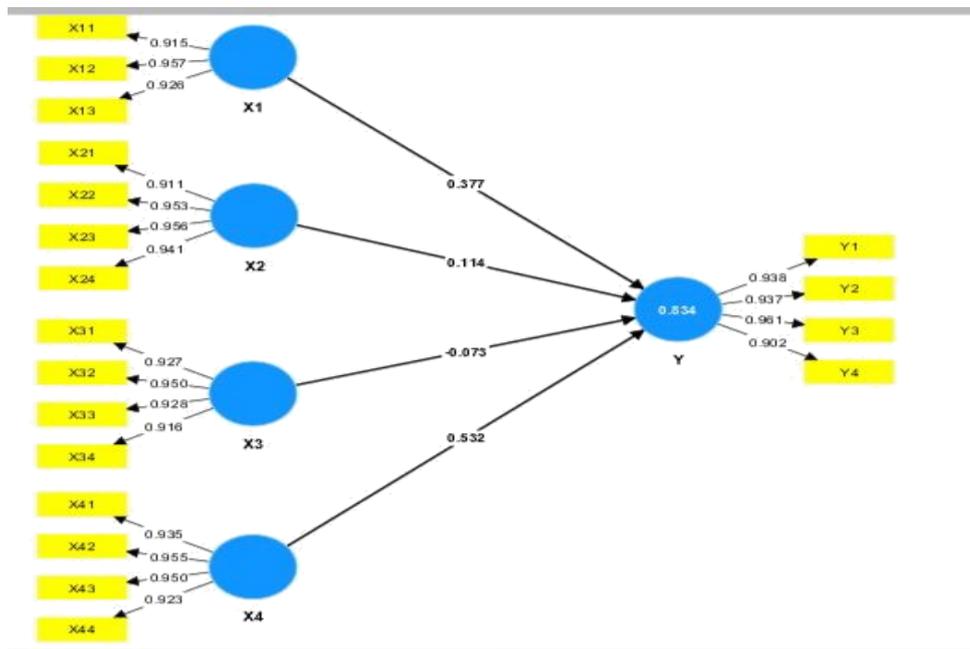
Sumber: Output SmartPLS

Hasil uji t variabel Transparansi memiliki tingkat signifikansi 0,003 lebih besar dari 0,05. Artinya Pemberdayaan Masyarakat dipengaruhi secara positif oleh variabel Transparansi. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa transparansi meningkatkan pemberdayaan masyarakat diterima.

Hasil uji t variabel Akuntabilitas memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,580 atau lebih tinggi dari 0,05. Artinya Pemberdayaan Masyarakat tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Akuntabilitas. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh pemberdayaan masyarakat ditolak.

Hasil uji t variabel Pemberdayaan Masyarakat memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,727 atau lebih besar dari 0,05. Artinya Pemberdayaan Masyarakat tidak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Partisipasi Masyarakat. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat dipengaruhi secara negatif oleh partisipasi dalam masyarakat ditolak.

Hasil uji t variabel Pengelolaan Dana Desa memiliki tingkat signifikansi 0,004 lebih besar dari 0,05. Artinya Pemberdayaan Masyarakat dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengelolaan Dana Desa meningkatkan pemberdayaan masyarakat diterima.



Gambar 3. Hasil Uji *Partial Least Square Bootstrapping*

PENUTUP

Pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh transparansi. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan pengelolaan dana desa terhadap masyarakat akan meningkat seiring dengan transparansinya, sedangkan pemberdayaan masyarakat akan menurun seiring dengan transparansinya. Pemberdayaan masyarakat tidak dipengaruhi secara signifikan oleh akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, tidak dipengaruhi oleh akuntabilitas. Partisipasi Masyarakat tidak Berpengaruh Signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasanya kurangnya antusias masyarakat dalam kegiatan atau program desa yang berpengaruh pada naik maupun turun nya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bergas Kidul Kabupaten Semarang. Pemberdayaan masyarakat dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, secara otomatis akan berdampak jika pengelolaan dana desa dibuat lebih transparan. Pemerintah Desa Bergas Kidul harus

meningkatkan partisipasi gotong royong masyarakat dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi hasil. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki desa, masyarakat juga dituntut untuk turut serta dalam menyukseskan kegiatan atau program yang direncanakan pemerintah desa. Pemerintah Desa Bergas Kidul juga harus memudahkan masyarakat dalam menerima akses informasi terkait dana desa dan pemerintah desa juga harus melakukan pengelolaan dana desa secara transparan atau terbuka dengan demikian maka masyarakat akan lebih antusias dan percaya terhadap pemerintah desa. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi melakukan penelitian selanjutnya dengan meningkatkan variabel dan memperluas sampel yang mempelajari Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan ialah untuk memberikan gambaran lebih luas dan kontemporer tentang Pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. L. H. (2012). *Partial Least Square: Konsep, Teknik dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hawin, A. (2023). Wow! 13 Desa Wisata di Kabupaten Semarang Terima Kucuran Dana Rp1,3 Miliar. Soloposjateng. <https://Jateng.Solopos.Com/Wow-13-Desa-Wisata-Di-Kabupaten-Semarang-Terima-Kucuran-Dana-Rp13-Miliar-1644874>.
- Humas. (2023). Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Read more: <https://setkab.go.id/pelaksanaan-pembinaan-dan-pengawasan-terhadap-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/>. Skertariat Kabinet Republik Indonesia. <https://Setkab.Go.Id/Pelaksanaan-Pembinaan-Dan-Pengawasan-Terhadap-Penyelenggaraan-Pemerintahan-Daerah/>.
- ICW. (2023). Indonesia Corruption Watch merilis temuan riset berupa tindakan korupsi dan fraud terbanyak sebesar lebih dari 63% terletak di pemerintah desa. <https://Antikorupsi.Org>.
- Ihza Pahlevi, M., Susilowati, E., & Widoretno, A. A. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1480–1486. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i3.2572>
- Kartika, A., Janah, A., & Hardiyanti, W. (2023). Deteksi Manajemen Laba: Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan, Kepemilikan Manajerial Dan Free Cash Flow (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Indonesia). *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 5(1), 51–63. <https://doi.org/10.35829/econbank.v5i1.260>
- Kede, E. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *10.33366/Jisip*, 8(4).
- Kusumawardani, A., Dhian Andanarini Minar Savitri, & Aurel Ariandrani. (2024). Exploratory Descriptive on the Self-Confidence of Prospective Accountants Toward Economic Digitalization. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 181–190. <https://doi.org/10.33369/jakuntansi.14.2.181-190>

- Lestari, R. I., Wardono, B., Saptana, S., Wardhana, I. W., Indarto, I., & Budiati, Y. (2023). The Village Fund Program and Indonesia's 18th Sustainable Development Goal: A Bibliometric and Content Study. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3505–3518. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.181115>
- Paselle, E., Annivelorita, ., Setyawati, S., Riyanto, T., & Benni, A. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan. *Jurnal Administrative Reform*, 6(2), 52. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i2.1899>
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 258–280. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>
- Rahmadhani, S., Faisal, F., Joseph, C., & Januarti, I. (2024). Corporate social responsibility and corporate investments: does research and development intensity matter? *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2375618>
- Saputri, I. W., Kikiana, M., & Kusumawardani, A. (2023). A *Qualitative Study on the Implementation of Accountability for Village Fund Management in the Post-Epidemic Era*.
- Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19). *Jurnal Media Birokrasi*, 33–50. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>
- Sugista, R. A. (2017). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Supriyanto, R., & Hariani, S. (2022). Dampak akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana, kebijakan, dan kelembagaan desa pada kesejahteraan masyarakat Section: Accounting and Auditing. *Journal of Public Auditing and Financial Management Corresponding Author*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.36407/jpafm.v2i1.562>
- Syafi'i, R. I. et. al. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Riser Akuntansi*, 7(2), 81–90.
- Titania, M. Y. (2023). Kualitas Dan Kepatuhan Pelayanan Publik Oleh Pemerintah Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4160>